



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Tolak Proyek Hotel TIM

PT Jakpro Belum Mau Batalan

JAKARTA - Sebagian anggota DPRD DKI Jakarta membantah bila telah merestui proyek pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM). Padahal sebelumnya, Komisi B usai melakukan kunjungan justru memberikan dukungan. Alhasil, polemik gedung yang berlokasi di Jalan Cikini Raya, Jakpus oleh PT Jakpro kembali bergulir.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyatakan, kendati dirinya masuk dalam Komisi B, tidak satu pemikiran dengan koleganya. Mantan ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat itu pun menegaskan, menolak keras pembangunan hotel di TIM.

"Saya tidak pernah menyetujui atau mendukung pembangunan wisma dan hotel di dalam TIM. Saya hanya mengungkapkan revitalisasi TIM harus berjalan, karena penyertaan modal daerah sudah diberikan dalam APBD sebesar Rp200 miliar," tandas dia kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Pandapotan, kunjungan yang dilakukan Komisi B DPRD DKI awal pekan lalu sempat mempertanyakan kajian dari penyertaan modal daerah pada APBD DKI untuk revitalisasi TIM yang direncanakan Rp1,8 triliun.

Selain itu, dirinya pun sempat menyampaikan agar seniman dan budayawan diajak berbicara untuk setiap kegiatan di dalam area TIM. "TIM merupakan tempat berkumpulnya seniman dan kebudayaan untuk mengekspresikan karyanya. Dan itu merupakan melakukan kegiatan kesenian keayahan sekaligus aset negara yang harus dijaga," beber dia.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya menolak pembangunan hotel dalam revitalisasi TIM. Karena itu, DPRD DKI memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS) 2020.

"PMD sudah kami potong Rp400 miliar, cuma kami kasih untuk TIM Rp200 miliar, tidak boleh ada hotel," tegas dia yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Prasetyo mengingatkan, Jakpro tidak boleh membangun area komersil dalam revitalisasi TIM, termasuk hotel. Apalagi, banyak hotel yang sudah berdiri di kawasan TIM. "Revitalisasi ya revitalisasi yang baik lah, jangan sampai ada komersilnya. Kiri kanan kan sudah banyak hotel," kata dia.

Secara keseluruhan, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp1,9 triliun. Komisi B DPRD DKI Jakarta mulanya merekomendasikan PMD untuk Jakpro sebesar Rp4,6 triliun.

Namun, karena rancangan KUA-PPAS defisit, PMD tersebut dipangkas menjadi Rp2,7 triliun dalam rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta. "PMD Jakpro, kami serut lebih dari Rp 1 triliun ya, jadi Rp 2,7 triliun sekian," ucap Prasetyo.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta M Taufik membenarkan hal itu. Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, pihaknya mengusulkan pemotongan anggaran PT Jakpro. Salah satu proyek Jakpro yang paling disoroti ialah pembangunan hotel di TIM.

"Ketika masuk pembahasan hotel ini jadi bahan pertimbangan kita, kita drop. Kita kan duit kurang, kenapa kita harus bangun bangunan baru? Jadi didropnya sebanyak Rp400 miliar jadi Rp200 miliar," kata Taufik.

Menurut Taufik, banyak warga yang tidak menyepakati pembangunan hotel tersebut. Terlebih, DKI masih mengejar pendapatan daerah yang belum tercapai. "Pertimbangannya adalah ada yang menjadi wacana publik hampir semua sepakat bahwa berkaitan revitalisasi untuk tidak dibangun," kata dia.

Di sisi lain, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum memutuskan untuk membatalkan rencana pembangu-

nan dalam proyek revitalisasi TIM. Walaupun telah ditentang sebagian anggota DPRD DKI Jakarta.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jakpro masih menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. "Kami baru terima (keputusan-red) kemarin (Rabu, 27/11) sore, sehingga kami perlu buat alternatif seperti apa dan nanti dilaporkan kepada pemegang saham (Pemprov DKI-red)," ungkap Hani Sumarno, sekretaris Perusahaan PT Jakpro saat dihubungi INDOPOS, Kamis (28/11/2019).

Dia menuturkan, DPRD DKI Jakarta memangkas dana Rp400 miliar dari Rp600 miliar di tahun 2020 untuk pembangunan wisma dalam proyek revitalisasi TIM. Pemangkasan itu dilakukan saat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapingab) DKI pada Rabu (27/11) lalu. "Jadi belum ada hasil akhir, baru kemarin dipotong, sehingga akan kami bawa ke manajemen untuk kemudian dilakukan perubahan," tutur dia.

Menurut Hani, aspirasi yang disampaikan DPRD DKI saat rapat itu telah diterima lembaganya.

Sebagai perusahaan yang mendapat tugas, semua langkah yang diambil harus mendapat persetujuan dari lembaga di atasnya.

Ia juga mengatakan, pembangunan hotel TIM merupakan bagian kecil dari gedung yang di dalamnya terdapat plaza sebagai sarana seniman berdiskusi dan latihan. Di sana juga terdapat perpustakaan dan galeri seni. "Memang di tahapan pertama (wisma-red), setelah groundbreaking sudah ada kontraktornya. Kami sudah kontrak yang jelas semua selesai 2021 bulan Oktober," imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Jakpro juga berencana akan berkoordinasi dengan BUMN Wika Gedung sebagai pelaksana proyek. Koordinasi itu dilakukan menyusul adanya pemangkasan anggaran revitalisasi dari Rp600 miliar menjadi Rp200 miliar pada 2020. "Kami harus duduk bersama dulu, kemudian nanti ada hal apa yang perlu diputuskan dari diskusi bersama sehingga dilaporkan kepada pemegang saham," kata dia. (aen)